

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
JUAL BELI KADAVAR**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

ARIVAN KURNIAWAN

NPM : 1321030148

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
JUAL BELI KADAVAR**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu syari'ah**

Oleh

ARIVAN KURNIAWAN

NPM : 1321030148

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ, M.Ag.

Pembimbing II : Relit Nur Edi S.Ag., M.Kom.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442H/2020M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan mayoritas yang dilakukan umat manusia untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam Jual beli terdapat rukun jual beli diantaranya, akad, orang-orang yang berakad, dan objek akad. Tetapi masih ada jual beli yang objeknya masih meragukan apakah boleh dijadikan sebagai objek jual beli atau tidak.

seperti hal nya jual beli kadaver, kadaver adalah kata lain dari mayat yang biasanya digunakan oleh mahasiswa kedokteran untuk dijadikan bahan praktek ataupun untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahannya diantaranya bagaimana praktik jual beli kadaver dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli kadaver ? Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum Perundang-undangan indonesia terhadap jual beli kadaver.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). karena penelitian ini dilakukan untuk mencari data khususnya mengenai jual beli kadaver dalam perspektif hukum islam. Sedangkan data diperoleh dengan cara membaca kemudian mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung dari referensi yang terkait dengan topik kajian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu menghasilkan berupa data-data tertulis. Metode yang di gunakan adalah metode analisis isi (content analysis) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis.

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukumnya praktik jual beli mayat tersebut, dan mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang jual beli mayat.

Dari hasil penelitian dari praktik jual beli kadaver, bahwa kadaver tersebut diperjual belikan untuk keperluan pendidikan bagi calon dokter, yang memang harus menggunakan mayat asli sebagai bahan penelitian mengingat pentingnya profesi seorang dokter karena menyangkut keselamatan manusia. Adapun pelaksanaan jual beli kadaver dilakukan antara mahasiswa dan Rumah sakit maupun universitas dan Rumah sakit, pelaksanaan jual beli kadaver dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mahasiswa yang datang ke Rumah sakit sendiri atau membeli kadaver melalui perantara pihak universitas, dan Hukum jual beli kadaver dalam islam adalah boleh, karena telah memenuhi unsur kemaslahatan bagi orang banyak, mengingat pentingnya proresi seorang dokter atau tenaga medis dalam kelangsungan hidup orang banyak, hal ini juga dikuatkan oleh fatwa majelis ulama indonesia no 6 tahun 2009 tentang otopsi jenazah.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Surahmih Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)-703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KADAVAR

Nama : ARIYAN KURNIAWAN

NPM : 1321030148

Prodi : MUAMALAH

Fakultas : SYARIAH

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mundzir H. M. Ag.
NIP. 195607271983031001

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP.196901051998031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0724) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KADAVAR"** disusun oleh Arivan Kurniawan, NPM. 1321030148, Prodi Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 18 agustus 2020.

TIM MUNAQASAH

- Ketua Sidang** : Agustina Nurhayani, S.Ag. M.H. (.....)
- Sekretaris** : Erik Rahman Gumiri, MH. (.....)
- Penguji Utama** : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)
- Penguji Kedua** : Drs. H. Mundzir HZ, M. Ag (.....)
- Penguji tiga** : Relit Nur-Edi, S.Ag., M.Kom.I (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Dr. H. Khairuddin, M.H.
081-196710221993031002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arivan Kurniawan
Npm : 1321030148
Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kadaver” adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali sebagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka, apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 5 Agustus 2020



Arivan Kurniawan
NPM 1321030148

MOTTO

... وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ ۲

“....dan tolong-menolonglah kamu dalam (berbuat) kebaikan dan jangan tolong-menolonglah (berbuat) dosa dan pelanggaran)”.
QS. Al-Maidah: 2.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang, yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, teruntuk bapak Ferli Yanto dan ibu Kristin Susanti yang telah menyayangi, mengasihi, dan mendidik serta mendoakan penulis untuk meraih kesuksesan.
2. Dosen pembimbing yang senantiasa dengan sabar membimbing dalam pembuatan dan penyertaan skripsi ini.
3. Kaka-kakak tercinta Arida Ria dan Marheti S.Pd, atas segala doa dukungan dan kasih sayang.
4. Kepada Rista Aprillia S.H yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Arivan Kurniawan, anak tunggal dari pasangan Bapak Ferli Yanto dan Ibu Kristin Susanti. Lahir di Mulyo Asri, pada tanggal 23 Maret 1996.

Riwayat pendidikan penulis:

1. SDN 06 Mulyo Asri pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2007
2. SMPN 01 Pugung Raharjo pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010
3. SMA Pembina Menggala pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syariah) pada fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2013 dan selesai tahun

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Kadaver” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saq., Keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan mu'amalah fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (SH) dalam bidang ilmu syari'ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini , tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. H. Khairuddin , M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Khoiruddin , M.S.I, selaku ketua jurusan Mu'analah, Drs, H. Mundzir HZ, M.Ag., selaku pembimbing I, dan Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I., selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak/ibu dosen dan staf karyawan fakultas syari'ah,
4. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
5. Sahabat-sahabatku rekan seperjuangan Mu'amalah A 2013
Diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar lampung, 11 Oktober 2020

Penulis,

Arivan Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
G. Signifikasi Penelitian	7
H. Metode Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Dasar Hukum Jual beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22

4. Bentuk dan Macam-macam Jual Beli	31
5. Jual Beli Yang Dilarang	35
6. Manfaat dan Hikmah Jual beli	48
B. Otoposi dan Teknik Otopsi	49
1. Otopsi dan teknik otopsi	50

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Pengertian kadaver	66
B. Praktik Jual Beli Kadaver	67
C. Faktor Jual Beli Kadaver.....	68

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Jual Beli Kadaver.....	68
B. Hukum Jual Beli Kadaver Dalam Islam	69

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI KADAVAR”**. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Kadaver adalah mayat yang diawetkan.¹ Dalam kasus ini kadaver yang dimaksud adalah mayat yang diawetkan dan dijadikan bahan praktik bagi mahasiswa kesehatan.
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Alquran dan hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).²

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 601.

² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet III (Jakarta: Amzah, 2014), h. 15.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul “Tinjauan hukum Islam tentang jual beli kadaver” adalah sebagai berikut:

1. **Alasan Obektif**, masih ada jual beli yang objeknya masih meragukan apakah boleh dijadikan sebagai objek jual beli atau tidak, seperti hal nya jual beli kadaver, kadaver adalah kata lain dari mayat yang biasanya digunakan oleh mahasiswa kedokteran untuk dijadikan bahan praktek ataupun untuk tujuan penelitian. Praktek yang dilakukan adalah dengan membedah mayat tersebut dan pada akhirnya hanya akan tersisa kulit dan tulang, mayat yang diperjualbelikan adalah mayat tanpa identitas.
2. **Alasan Subjektif**, ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. Hubungan ini disebut dengan muamalah, muamalah ialah hubungan antar manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat kebutuhan dan tuntunan agama.³

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang: aqidah, yaitu pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau berkeyakinan.

³ Al-Ustadz H. Idris Ahmad, *fiqh menurut Madzab Syafi'i*, (Djakarta: Widjaya Djakarta, 1969), h. 3.

Terutama tentang bidang akhlak, yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersifat baik dalam rangka berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia beribadah kepada Allah SWT, pedoman muamalah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa, berekonomi dan sebagainya.⁴

Agama Islam memberikan norma dan etika yang bersifat wajar dalam usaha mencari kekayaan guna memberi kesempatan pada perkembangan hidup manusia di bidang muamalat di kemudian hari. Islam juga memberikan tuntunan supaya pintu perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan salah satu pihak dan kebebasan yang tidak semestinya kepada pihak lain. Dengan kata lain, masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-naiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya tanpa memberikan mudharat kepada orang lain.⁵

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan akan sandang pangan dan papan yang tidak pernah berkurang bahkan kian bertambah mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan.

Dari sekian banyak jenis usaha untuk memenuhi segala kebutuhan manusia, salah satunya adalah dengan jual beli. Praktik jual beli merupakan bentuk muamalah yang intinya adalah suatu perjanjian tukar-menukar di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: BPFE, 1978), h. 1.

⁵ Nazar Bakry, *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁶

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁷

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari saling suka rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Jual beli terjadi karena satu pihak memiliki barang dan di pihak lain ada yang membutuhkannya. Demikian juga dengan jual beli *kadaver* yang akan dibahas dalam skripsi ini, *kadaver* merupakan mayat yang diawetkan. Praktik jual beli *kadaver* (mayat) ini meskipun terdengar tabu untuk di kalangan masyarakat awam, akan tetapi praktik jual beli ini masih eksis hingga kini di kalangan mahasiswa kedokteran.

Adapun *kadaver* (mayat) ini digunakan untuk dibedah (otopsi), terdapat tiga macam otopsi yaitu otopsi anatomis, otopsi

⁶ Prof. Dr. H. Hendi Suhandi, *fiqh muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h.69

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Al-wa'ah, 1997), h. 122.

klinik dan otopsi kehakiman/forensik.⁸ Kadaver (mayat) ini dibeli dari rumah sakit dan Rumah sakit ini memperoleh mayat tersebut dari jenazah yang tanpa identitas maupun jenazah yang tidak diambil kembali oleh keluarganya. Praktik yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan *kadaver* (mayat) tersebut secara keseluruhan hingga hanya tersisa kulit dan tulang dengan cara membedah atau merobek bagian-bagian yang diperlukan.

Padahal, ini tidaklah selayaknya diperlakukan pada jasad manusia, terlebih lagi bila ditinjau dari hukum Islam terdapat dalil-dalil tentang hukum perlakuan pada mayat manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Isra :70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”

Ayat ini menunjukkan bahwa jasad manusia itu mulia. Dan kemuliaan ini berlaku baik dalam keadaan ia hidup maupun sudah mati. Sedangkan dalam proses bedah mayat, terjadi perlakuan tidak mulia terhadap mayat seperti dipotong daging atau tulangnya, diangkat organ tubuh dan perlakuan lain yang sejenis.

Secara hukum Islam masih belum jelas hukum jual beli *kadaver* (mayat) ini karena tidak memenuhi syarat *ma'qud 'alaih*, yaitu barang harus milik sendiri tidak boleh milik orang lain.

⁸ Departemen Ilmu Kedokteran dan Medikolegal, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, (Surabaya, 2010), h. 201.

Sedangkan disisi lain ada banyak masalah yang diambil dari jual beli tersebut. Disinilah peneliti tertarik untuk menelusuri dan meneliti apakah jual beli tersebut sah atau tidak.

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah tentang *“Tinjauan hukum Islam tentang jual beli kadaver”*.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana praktik jual beli kadaver, serta bagaimana hukum tentang jual beli kadaver tersebut apakah dibolehkan menurut pandangan hukum islam atau tidak.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli kadaver ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli kadaver?

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kadaver.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum perundang-undangan Indonesia dan hukum Islam tentang jual beli kadaver.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis untuk memberikan pemahaman mengenai jual beli kadaver dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah dan jurusan muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi

penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Di dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri tentang manfaat nya, adapun diantara manfaat yang dapat diberikan:

- a. Manfaat teoritis atau keilmuan
 1. Untuk mengetahui seberapa penting peran kadaver dalam bidang kesehatan, khusus nya bagi para mahasiswa kesehatan atau calon dokter.
 2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada perkembangan bidang keilmuan.
- b. Manfaat praktis
 1. Permasalahan yang terjadi diharapkan dapat segera diketahui, dan selanjutnya dapat diberikan solusi.
 2. Manfaat penelitian ini juga diajukan untuk kegunaan praktis, yaitu menyelesaikan persoalan sejenis baik dalam sebuah masyarakat dan negara.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.⁹ Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 911.

pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.¹⁰ Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku-buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu dan berbagai literatur yang terkait dengan topik kajian.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis data yang diperoleh secara jelas dan terperinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang dibutuhkan meliputi:

¹⁰Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 1.

¹¹ Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

a. Bahan Hukum Primer (pokok)

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹² Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang mendukung data penelitian, pengumpulan data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan judul-judul lain yang berkaitan dengan judul proposal yang dimaksud.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan data

Dalam penelitian ini pengumpulan data penulis menggunakan dokumentasi dengan cara membaca, menelaah, menyalin, mengutip serta mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen).

¹² Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor Indonesia: Ghlia, 2009), h. 60.

- c. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹³

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis dan pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan jelas penelitian ini menggunakan tehnik berfikir deduktif, yaitu tehnik analisis data yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa yang bersifat umum dikaji untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus atau upaya penghususan suatu hasil penelitian atau data yang umum sifatnya.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, 2004), h. 131.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mudabalah*.¹⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. Fathir (35) ayat 29, sebagai berikut:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “mereka mengharapakan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.”¹⁵

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dan beli memiliki arti tolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.¹⁶

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.¹⁷ Para ulama memberi definisi tentang jual beli sebagai berikut:

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67. Lihat juga Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan 5, (Jakarta: Pustaka Setia, 2015), h. 73.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa, 2012), h. 438.

¹⁶ Racmat Syafe'i h. 73.

¹⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

- a. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu:

¹⁸ وَهُوَ مَبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya: Saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu, atau

¹⁹ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dua definisi di atas diambil pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud fuqaha Hanafiyah adalah melalui ijab, yaitu ungkapan dari pembeli, dan qabul, yaitu pernyataan menjual dari penjual. Kemudian dalam definisi di atas juga disebutkan “yang bermanfaat”, disini yang dimaksud adalah harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi muslim. Sehingga bangkai, minuman dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena jenis-jenis benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap di perjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.²⁰

- b. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli menjadi dua macam, yaitu:

¹⁸ Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1990), h. 135.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Hendi Suhendi, h. 113.

- 1) Jual beli dalam arti umum, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَ صَـةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةَ لَدَّةٍ.²¹

Artinya: Jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati.²²

- 2) Jual beli dalam arti khusus, yaitu:

فَهُوَ عَقْدٌ مَعَا وَ صَـةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةَ لَدَّةٍ أَوْ مَكَا يَسَةً

أَحَدٌ عَوَ صِيَّةٍ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِصَّةٍ مُعَيَّنٍ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ.²³

²¹ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 204.

²² Hendi Suhendi, h. 69.

²³ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, h. 372.

Artinya: Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaran bukan emas bukan pula perak, benda yang dapat di realisir dan ada sertifikat (tidak diragukan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembali maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah di ketahui terlebih dahulu.²⁴

- c. Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli, yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.²⁵
- d. Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli, yaitu:

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا .²⁶

Artinya: Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.

Menurut Ibnu Qadamah perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilik harta benda

²⁴ Hendi Suhendi, h. 70.

²⁵ Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaliddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1.

²⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III, (Bandung: Alma'arif, 1987) h. 559.

dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Kemudian yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).²⁷

- e. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu: jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.²⁸
- f. Wahbah Az-Zuhaili Mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'athaa* (tanpa ijab qabul).²⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Mu'amalah* (Klasik Kotemporer), (Bogor: Graham Indonesia, 2012), h. 75.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid ke 12, (Bandung: Alma'arif, 1987), h. 45.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu ada kalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya dan tak ada yang menyerupai dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.³⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syatibi (w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik ikhtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).³¹ Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

³⁰ Hendi Suhendi, h. 69.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.

a. Al-Qur'an

Hukum jual beli yang disyari'atkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an antara lain:

- 1) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275

...وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا³²

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah (2) : 275)

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas-tegas menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.³³

- 2) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ³⁴

Artinya: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu." (Q.S. Al-Baqarah (2) : 198)

³² Departemen Agama RI, h. 47.

³³ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173-174.

³⁴ Departemen Agama RI, h. 31.

3) Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa' (4) : 29)³⁵

Isi kandungan ayat di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan (الباطل) al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan (عن تر اض منكم) an tarâdhdhin minkum. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.³⁶

³⁵ Ibid., h. 83.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

b. Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. di antaranya adalah:

1) Hadis Riwayat Al-Baz-zar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ، عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)³⁷

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi ra., bahwasanya Nabi Saw. pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik."* (H.R. Al-Baz-zar).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT.

2) Hadis Riwayat Bukhari

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص م قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَاشْتَرَى وَازْأَفْتَضَ (رواه البخاري)³⁸

Artinya: *Dari Jabir Bin Abdullah r.a., katanya: Rasulullah saw. Bersabda "Allah mengasihi orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih."* (H.R.Bukhari).

³⁷ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, penerjemah: Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 303.

³⁸ _____, *Shahih Bukhari I-IV*, Jilid II, penerjemah: Zainuddin Hamidy, Fachruddin, dkk, (Jakarta: Widjaya), h. 255.

c. Ijma

Umat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini.³⁹ Para ahli ushul merumuskan kadiyah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى مَنْعِهِ⁴⁰

“Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”.

Itu artinya, mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma, ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara*’.⁴² Rukun dan syarat dalam praktik jual beli merupakan hal yang sangat penting. Sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli itu, antara lain:

³⁹ Sayyid Sabiq, h. 48.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 59-60.

⁴¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

⁴² Rachmat Syafe’i, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 76.

a. Rukun Jual Beli

Rukun adalah mufrad dari kata jama' *arkan*, artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuai yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.⁴³

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan penjual ke pembeli) dan *qabul* (ungkapan pembeli ke penjual). Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukannya indikator (*Qarinah*) yang menunjukan kerelaan antar kedua belah pihak untuk mengaplikasikan dalam bentuk perkataan, yaitu *ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁴⁴

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu:

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang;
- 3) Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan

⁴³ M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 300-301.

⁴⁴ M. Ali Hasan, h. 118.

mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.⁴⁵

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a) Pihak-pihak yang berakad (*al-'aqdani*).

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku *ijab* dan *qabul* haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.⁴⁶

b) Adanya sighat akad (*ijab qabul*)

Ijab dan *qabul* merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:

- (1) *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, *ijab* dan *qabul* harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.

⁴⁵ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 102.

⁴⁶ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Cetakan Pertama, (Lampung: IAIN Raden Intan, 2015), h. 141.

- (2) *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- (3) *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.⁴⁷

Ijab dan *qabul* (sighat 'aqad) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- (a) Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat di mengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- (b) Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majlis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.
- (c) Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang melakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 66-67.

yang berakad tidak berbicara dan tidak dapat menulis.⁴⁸

c) *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)

d) *Saman* (nilai tukar pengganti barang)

Dalam Hukum Perdata, unsur-unsur jual beli antara lain:⁴⁹

- a) Subjek hukum, yaitu pihak penjual dan pembeli;
- b) Status hukum, yaitu untuk kepentingan diri sendiri atau pihak lain;
- c) Peristiwa hukum, yaitu persetujuan penyerahan hak milik dan pembayaran;
- d) Objek hukum, yaitu benda dan harga;
- e) Hubungan hukum, yaitu keterikatan kewajiban dan hak pihak-pihak.

b. Syarat syahnya jual beli

Hukum dasar dalam masalah muamalah syarat ini adalah keabsahan dan keharusannya bagi orang yang memang disyaratkan dengannya. Hal ini di dasarkan kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, “orang-orang muslim menurut syarat-syaratnya mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.⁵⁰

Salah satunya dinyatakan: hukum dasar dalam berbagai akad dan syarat ialah adanya larangan di dalamnya, kecuali yang disebutkan pembolehananya dalam syari'at. Ini merupakan pernyataan ahli zhahir dan

⁴⁸ *Ibid*, h. 68-70.

⁴⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 319.

⁵⁰ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul-Falah, 1992), h. 630.

termasuk dasar hukum ahli ushul Abu Hanifah, mayoritas Asy-syafi'i, sebagian rekan Malik dan Ahmad. Terkadang Ahmad memberikan alasan kebatilan akad, karena tidak disinggung oleh *atsar* dan *qiyas*. Begitu pula sebagian rekan-rekannya yang memberikan alasan tidak syahnya syarat, karena ia bertentangan dengan keharusan akad. Mereka berkata, “apa pun yang bertentangan dengan keharusan akad, maka ia bathil”. Sedangkan zhahir tidak menganggapnya sah baik akad maupun syaratnya, kecuali yang membolehkannya ditetapkan *nash* atau *ijma'*. Sedangkan Abu Hanifah, prinsip hukumnya mengharuskan tidak sahnya syarat dalam akad, yang bertentangan dengannya secara mutlak. Asy-syafi'i sependapat dengannya, bahwa setiap syarat bertentangan dengan keharusan akad adalah bathil.⁵¹

- 1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a) *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak

⁵¹ *Ibid.* h. 636.

tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut saya sangat setuju, karena apabila anak yang belum baligh (dewasa) tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syariat Islam) tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.⁵² Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nissa :6 yang berbunyi

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَسَّيْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا
وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا ٦

Artinya : Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan

⁵² *Ibid.* h. 636.

dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)

- b) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 5 :

وَلَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang telah ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.⁵³

⁵³ Departemen Agama RI., h. 122.

- c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli
- d) bukan karena kehendak sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi merupakan syarat mutlak keabsahannya.⁵⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta yang ada diantara kamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suak sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT maha penyayang kepadamu.⁵⁵

Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu dianggap sah. Seperti jika ada seorang hakim yang

⁵⁴ Madani, h. 104.

⁵⁵ *Ibid*, h. 122.

memaksanya untuk menjual hak miliknya untuk menunaikan kewajiban agamanya, maka paksaan ini adalah yang didasarkan atas kebenaran.⁵⁶

- e) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukansendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

4. Bentuk dan Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁵⁷

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan).
- c. Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu mual beli yang dilarang agama Islam

⁵⁶ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwan, dan Budiman Musthofa, Cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 366.

⁵⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 71.

karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian antara satu pihak.

Mahzab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk:⁵⁸

- a) Jual beli yang *shahih* yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun-rukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu *shahih* dan dapat mengikat keduanya.
- b) Jual beli yang *bathil* yaitu jual beli tersebut satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, macam-macam jual beli *bathil* yakni:
 - (1) Jual beli sesuatu yang tidak ada
Para ulama fikih bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.
 - (2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan
Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkar.
 - (3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan
Jual beli seperti ini juga tidak sah karena mengandung unsure tipuan yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang kelihatannya baik padahal barang tersebut tidak baik.

⁵⁸ M. Ali Hasan., h. 128-137.

(4) Jual beli barang najis

Jual beli benda atau barang yang najis hukumnya tidak sah seperti babi, bangkai, darah, khamr, sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna-makna dalam arti hakiki menurut syara'.⁵⁹

(5) Jual beli *al-urbhan*

Jual beli bentuknya dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah dikembalikan lagi kepada si penjual maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik penjual. Jual beli tersebut dilarang.

(6) Jual beli *fasid*

Menurut ulama Mahzab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal apabila kerusaann dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan maka hukumnya batal. Seperti memperjual belikan benda-benda haram (khamr, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antar jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Diantara jual beli yang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, antara lain:⁶⁰

⁵⁹ Imam Ahmad bin Hambal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal juz IV, (Libanon: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1993), h. 29.

⁶⁰ Nasrun Harun, *Op.Cit.*, h. 128-129.

- (7) Jual beli *al majhl* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui secara menyeluruh.
- c) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.
 - d) Jual beli barang yang ghoib, tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
 - e) Jual beli orang buta. Dimana orang buta tidak melihat barang yang diperjual belikan. Menurut fuqoha Hnafiyah, Malikiyah dan Hanabillah jual beli orang buta hukumnya sah dan ia memiliki hak khiyar sepanjang ia dapat mengenali seperti melalui perabaan atau penciuman. Menurut Syafi'iyah, jual beli orang buta tidak sah, kecuali sebelumnya ia mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang buta barang yang diperjual belikan bersifat *majhul*.⁶¹
 - f) Barter dengan barang yang diharamkan umpannya barang-barang yang diharamkan menjadi harga.
 - g) Jual bali *ajal*. Misalnya seorang menjual bayarannya dengan harga Rp. 100.00,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli pemilik barang pertama membeli kembali

⁶¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2002), h. 136-137.

barang itu dengan harga yang lenih rendah, dengan harga Rp. 75.000,-.⁶²

- h) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamr. Apabila penjualan anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu produsen khamr.
- i) Jual beli yang bergantung pada syarat. Seperti ungkapan pedagang: “jika tunai harganya Rp. 10.000,- , dan jika berhutang harganya Rp. 15.000,-.
- j) Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.

5. Jual Beli Yang Dilarang Menurut Hukum Islam

Rasulullah SAW. Melarang jual-beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan dikalangan kaum muslim.

Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Jual beli yang dilarang karena pihak-pihak yang berakad (الْعُقَدَانِ). Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:
 - 1) Orang gila, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah*

⁶² *Ibid*, h. 138-139.

(kemampuan). Disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

- 2) Anak kecil, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
- 3) Orang buta, jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.
- 4) Orang yang dipaksa, menurut Ulama Hanafiyah berdasarkan pengkajian jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.
- 5) Jual beli *fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri). Oleh karena itu, para Ulama sepakat bahwa jual beli *fudhul* tidak sah.
- 6) Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros, maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah,

sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.⁶³

7) Jual beli *Malja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan / مَوْقَدٌ عَلَيْهِ), antara lain :

1) Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan). Hukum Islam melarang jual beli seperti ini, sebagaimana hadits Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ عَرَزٌ. (رواه أحمد)⁶⁴

Artinya : Mewartakan Muhammad bin Samak dari Yazid bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabbin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud katanya : telah bersabda Rasul Saw., jangan kamu beli ikan yang berada di dalam air,

⁶³ *Ibid*, h. 13

⁶⁴ Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay'i Fadhlil Ma'i Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar'i Kala'i Tahrim Mani Badlaihi WA Tahrimu Bay'i Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8, h. 3494.

karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas.(HR. Ahmad).

2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan

Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan maksudnya adalah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di air, dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.

Dalam kitab *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, jual beli seperti ini dikategorikan tidak sah karena menjual buah sebelum tampak baiknya, sesuai dengan hadits Rasulullah Saw.⁶⁵ Yang artinya : Diceritakan Abdullah bin Yusuf, mengabarkan Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata : “Nabi Saw. melarang menjual buah di pohon sehingga terlihat nyata baiknya, Nabi Saw. melarang yang menjual dan yang membeli.” (H.R. Bukhari Muslim).

4) Jual beli sperma binatang

Dalam jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar mendapatkan keturunan

⁶⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al Lu'lu' Wal Marjan*, penerjemah Salim Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), h. 524.

yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw. :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَأَقِيحِ (رواه البزار)⁶⁶

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya, “Nabi Saw. melarang jual beli anak hewanyang masih dalam kandungan dan bibit (air sperma binatang). (H.R. Al-Bazzar)⁶⁷

5) Jual beli yang dihukumi najis oleh agama Islam (Al-Quran)

Jual beli yang dihukumi najis dalam gama Islam maksudnya ialah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama, seperti arak/khamr, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَ الْمَيْتَةِ وَالْخَنَزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شَحُومَ الْمَيْتَةِ ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ ، وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ : لَا ، هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ

⁶⁶ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, h. 322.

⁶⁷ Dikutip dalam bukunya Al Hafidh Hajar Al Asqalani.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ
جَلَّ، لَمَّا حَرَّمَهُ، فَأَكْلُ ثَمَنِهِ . (رواه البخاري و مسلم)⁶⁸

Artinya: Meriwayatkan Qataibah, meriwayatkan Al-Laits dari Yazid bin Abu Habib, dari ‘Ato bin Abu Rabbah, dari Jabir bin Abdullah r.a. telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda ketika Fathu Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan khamr (arak), babi, bangkai, dan patung-patung (berhala).” Lalu ditanya: “Wahai Rasulullah, bagaimanakah pendapatmu tentang lemak-lemak (gajih) bangkai yang digunakan untuk mencat kapal (perahu), meminyaki kulit, juga untuk menyalakan lampu?” Maka Rasulullah menjawab: “Tidak boleh, tetap haram menjualnya.” Kemudian dilanjutkan sabdanya, “Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak (gajih), lalu mereka berusaha mengolahnya kemudian dijual dan dimakan hasilnya (penjualan itu).” (H.R. Bukhari Muslim).⁶⁹

Dilarangnya memperdagangkan barang-barang tersebut adalah karena dapat menimbulkan perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan kemaksiatan. Tujuan diharamkannya dapat melambankan perbuatan maksiat dan dapat mematikan

⁶⁸ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori., No. Hadits 2096, h. 841.

⁶⁹ Dikutip dalam bukunya Al Iman Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori.

orang untuk ingat kepada kemaksiatan serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.⁷⁰

6) Jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab belum ada dan belum tampak jelas. Penjualan ini dilarang karena penjualan yang gelap masanya, spekulasi, juga belum diketahui jantan atau betina.⁷¹

7) Jual beli *muzabanah*

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedang ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik kering. Jual beli seperti dilarang, hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw. :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَلِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا، وَبَيْعِ الزَّيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا.
(رواه البخاري و مسلم)⁷²

⁷⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 352.

⁷¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi., h. 518.

⁷² Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori., No. Hadits 2039, h. 820.

Artinya: Diceritakan Ismail diceritakan Malik dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata :
 “Rasulullah Saw. melarang penjualan *muzabanah*, yaitu menjual buah di pohon dengan tamar yang jelas berat timbangannya, dan menjual kismis dengan anggur yang masih di pohon.” (H.R. Bukhari Muslim)⁷³

8) Jual beli *muhaqqalah*

Jual beli *muhaqqalah* yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur-unsur riba di dalamnya (untung-untungan). Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw. Yang artinya: Meriwayatkan Abdullah bin Yusuf mengabarkan Malik, dari Dawud bin Hushaini, dari Abu Sufyan Maula bin Abu Ahmad dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. berkata : Rasulullah Saw. melarang *muzabanah*, yaitu menjual buah kurma ruthab yang masih di atas pohon dengan tamar, juga *muhaqqalah* mengerjakan hasil yang tentu sepertiga, seperempat, dan sebagainya. (H.R. Bukhari Muslim)⁷⁴

9) Jual beli *mukhadharah*

Jual beli *mukhadharah* adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh

⁷³ Dikutip dalam bukunya Al Iman Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori.

⁷⁴ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori., No. Hadits 2039, h. 824.

agama karena barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.⁷⁵

10) Jual beli *mulammasah*

Jual beli *mulammasah* adalah jual beli secara menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.⁷⁶

11) Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* adalah jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata : “lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : يُنْهَى عَنْ صِيَا مَيْنِ وَ بَيْعَتَيْنِ ،
الْفِطْرُ وَالنَّخْرُ ، وَلُمْلَأَ مَسَّهُ وَ الْمُنَا بَدَّةُ (رواه البخاري و مسلم)⁷⁷

⁷⁵ *Ibid*, No. Hadits 2053, h. 825.

⁷⁶ H.A. Khumedi Ja'far, h. 154.

⁷⁷ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhari*, Jilid I, No. Hadits 2015, (Bandung: Dahlan, tt), h. 759

Artinya: Abu Hurairah r.a. berkata : Nabi Saw. melarang dua macam puasa dan dua macam jual beli. Puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, jual beli dengan cara menyentuh dan melempar. (H.R. Bukhari Muslim)⁷⁸

- c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul), antara lain:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

2) Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau perantara utusan.

Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan para ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.⁷⁹

3) Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab Kabul

Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antar ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada

⁷⁸ Dikutip dalam bukunya Al Iman Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori.

⁷⁹ H.A. Khumedi Ja'far, h. 155.

kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.⁸⁰

4) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

5) Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw. :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّجَشُّسِ
(رواه البخاري و مسلم)⁸¹

Artinya: Diceritakan Abdullah bin Maslamah, diceritakan Malik dari Nafi'i dari Bin Umar r.a. berkata bahwa "Rasulullah Saw. telah melarang jual beli *najasyi*." (H.R. Bukhari Muslim)

⁸⁰ *Ibid*, h. 156.

⁸¹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori., No. Hadits 2011, h.

6) Menjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya. Contohnya seseorang berkata : “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu”

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

7) Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli di bawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

Hal ini sebagaimana hadist Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ
قَالَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : مُهِينًا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ

لِبَادٍ. (رواه البخاري و مسلم)⁸²

⁸² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerbit Darul Akhyar, Beirut, 773 H-852H, h. 195.

Artinya: Diceritakan Muhammad bin Mutsanna, diceritakan Ibnu ‘Un dari Muhammad berkata dari Anas bin Malik r.a. berkata: Kami dilarang (oleh Nabi Saw.) seorang penduduk menjualkan barang orang yang baru datang dari dusun. (H.R. Bukhari Muslim).

8) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain

Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawar orang lain adalah apabila seseorang berkata: “Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁸³

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ . (رواه البخاري و مسلم)⁸⁴

Artinya : Diriwayatkan Isma’il berkata menceritakan Malik dari Nafi’ dari Abdullah Bin Umar r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak boleh menjual untuk merusak penjualan kawannya.” (H.R. Bukhari Muslim)

⁸³ H.A. Khumedi Ja’far, *Op.Cit.*, h. 158.

⁸⁴ *ibid.*, No. Hadits 2008, h. 812

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:

1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil.
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal
4. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
6. Dapat menciptakan hubungan silahturrahim dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

6. Masalah Mursalah

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata Shalaha (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadannya kerusakan”. Pengertian mashlahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan –perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti

menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Dengan begitu mashlahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan.

Dalam mengartikan mashlahah secara definitf terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama, berikut pendapatnya :

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan),
2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hamper sama dengan Al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara' dengan menghindarkan kerusakan dari manusia.
3. Al- 'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qowa'id al-Ahkam, memberikan arti mashlahah dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk majazi nya adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan" tersebut.
4. Al-Syatibi mengartikan mashlahah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada mashlahah.

a. Dari segi terjadinya mashlahah dalam kenyataan, berarti :

“Sesuatu kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.”

b. Dari tergantungnya tuntunan syara' kepada mashlahah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

5. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-Amin dalam bukunya al-Maqasid al –ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah mendefinisikan mashlalah sebagai berikut

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat”

Definisi dari al-Thufi ini berkesesuaian dengan definisi al-Ghazali yang memandang mashlahah dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.

Dari berbagai definisi tentang mashlahah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa mashlahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dari kesimpulan terlihat adanya perbedaan antara mashlahah dalam pengertian bahasa dan dalam pengertian hokum atau syara'. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan syara' yang dijadikan rujukan. Mashlahah dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada mashlahah dalam artian syara' yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi rujukan nya adalah hokum syara' yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidakseimbangan.

masalah hukum sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode istinbât hukum, menjadikan hukum Islam itu luwes, dan keuniversalan hukum Islam ditunjukkan dengan aplikasi lokal, artinya dapat diterapkan pada setiap ruang dan waktu di segala bidang sosial⁸⁵

7. Otopsi

a. Otopsi Dan Teknik Otopsi

Menurut peraturan pada umumnya tiap jenazah harus dimakamkan secara utuh, kecuali yang bersangkutan menghendaki lain, misalnya.

⁸⁵ AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014

- 1) Jenazahnya diserahkan pada suatu fakultas kedokteran untuk dibedah mayat anatomis.
- 2) Jenazahnya boleh dilakukan bedah mayat klinis.
- 3) Jenazahnya diserahkan pada rumah sakit guna ransplatasi untuk menolong sesama manusia sebagai donor.

Untuk menggunakan jasad manusia setelah meninggal, maka oleh pemerintah telah dikeluarkan peraturan tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh pada manusia yaitu P.P.18 tahun 1981 / L.N 1981/23 tentang bedah mayat klinis

Peraturan lain mengenai bedah mayat anatomis dan bedah mayat klinis dapat ditemukan juga dalam:

- a) Staatsblad 1871 No.91.
 - b) Bedah mayat klinis dalam lingkungan ABRI yang merupakan keputusan menteri pertahanan-keamanan/panglima angkatan bersenjata No.: Kep/B/20/V/1972
 - c) UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 48.119,120,121,124.⁸⁶
- b. Bedah Mayat (Otopsi)

Selain kata otopsi yang juga biasa dipakai adalah Seksi, Nekropsi, Obduksi dan pemeriksaan post mortem, ada 3 macam otopsi :

⁸⁶ Hoediyanto-hariadi A. *Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal* (surabaya alumni. 2010) hal 201

1) Otopsi anatomis

Syarat untuk dapat melakukan otopsi anatomis menurut P.P. 18 tahun 1981 ialah.

- (a) Adanya surat wasiat dari yang bersangkutan yang menghendaki supaya mayatnya diserahkan kepada suatu fakultas kedokteran untuk otopsi anatomis yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam *burgelijk wetboek* (W.B) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 935.
- (b) Surat persetujuan keluarga yang terdekat yang menyerahkan mayat yang bersangkutan kepada fakultas kedokteran.
- (c) Tanpa persetujuan keluarga yang terdekat, bila dalam waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke Rumah sakit untuk mengurus mayat.⁸⁷

Setelah dalam waktu 2 x 24 jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal untuk mengurus mayat, maka mayat dapat diawetkan dengan penyuntikan formalin 10% dan disimpan paling sedikit 6 bulan sebelum dilakukan otopsi anatomis.

Apakah prosedur di atas tersebut dapat dipertanggung jawabkan ? Menurut B.W 935 mayat adalah benda yang dapat diwariskan. Bila tidak ada ahli waris yang mengajukan diri, maka setelah 3 tahun

⁸⁷ *Ibid.*, h. 201

harta peninggalannya dikuasai oleh negara (B.W. 1129).

Ada kalanya pada mayat waktu dilakukan otopsi anatomis ditemukan tanda-tanda kekerasan, dalam hal demikian mayat dikembalikan ke bagian ilmu kedokteran forensik untuk selanjutnya diperiksa dengan tidak mengurangi formalitas hukum yang harus dipenuhi⁸⁸

2) Otopsi Klinik

Otopsi klinik adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha pemulihan kesehatan.

Otopsi klinik kemudian dilengkapi dengan pemeriksaan :

1. Histopatologi
2. Bakteriologi/virologi
3. Toksikologi
4. Sero-imunologi

Syarat untuk melakukan otopsi klinik (P.P. 18 tahun 1981):

- (a) Adanya surat wasiat dari yang bersangkutan yang menghendaki pada mayatnya

⁸⁸ *Ibid.*, h. 202.

dilakukan otopsi klinik yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam B.W.935.

- (b) Surat persetujuan keluarga terdekat bahwa pada mayat dapat dilakukan otopsi klinik.
- (c) Tanpa persetujuan keluarga terdekat, apabila penderita diduga menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- (d) Tanpa persetujuan keluarga terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam tidak ada keluarga terdekat, dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit untuk mengurus mayat.⁸⁹

P.P. 18 tahun 1981 menghendaki : persetujuan oleh yang bersangkutan atau keluarga terdekat untuk otopsi anatomis, otopsi klinik atau transplantasi harus dibuat diatas kertas bermatrai dengan dua ornat saksi. Dengan keluarga terdekat diartikan: isteri, suami, ibu, bapak atau saudara seibu seapak (sekandung) dari penderita dan saudara ibu, saudara bapak serta anak yang telah dewasa dari penderita.

Peraturan otopsi klinis untuk ABRI menurut keputusan Menteri pertahanan kamanan/panglima

⁸⁹ *Ibid.*, h. 202.

Angkatan Bersenjata Nomor: Nomor Kep/B/20/V1972.
Bab II Bedah Mayat Klinis :⁹⁰

Pasal 2

Bedah mayat klinis dilakukan dalam keadaan-keadaan sebagai berikut :

- (1) Apabila anggota ABRI meninggal di Rumah sakit dalam waktu 48 jam setelah saat masuknya di Rumah sakit tersebut (admission)
- (2) Apabila anggota ABRI meninggal dirumah sakit dan diagnosanya tidak diketahui dengan tepat, dan/atau penyakitnya berdasarkan penetapan dokter/dokter-dokter yang merawatnya, mengandung bahaya bagi orang lain.
- (3) Apabila anggota ABRI meninggal selama mengikuti suatu latihan kemiliteran atau dalam waktu 48 jam setelah saat latihan dihentikan, dan diduga atau patut diduga bahwa kematiannya itu ada hubungannya dengan latihan tersebut
- (4) Apabila anggota ABRI meninggal sebagai akibat suatu kecelakaan, yang sebabnya diduga atau patut diduga ditimbulkan oleh keadaan anggota ABRI yang meninggal tersebut.
- (5) Apabila anggota ABRI meninggal karena sebab-sebab yang diduga atau patut diduga merupakan

⁹⁰ *Ibid.*, h. 203

akibat kedinasan, diluar yang dimaksud oleh ayat (3) dan (4) pasal ini.⁹¹

Pasal 3

- (1) Untuk dapat dilakukan bedah mayat klinis pada keadaan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (5), diperlukan persetujuan tertulis anggota ABRI yang bersangkutan sebelum meninggal atau keluarga nya yang terdekat
- (2) Untuk dapat dilakukan bedah mayat klinis pada keadaan-keadaan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) dan (4), tidak diperlukan persetujuan tersebut dalam ayat ayat(1) pasal ini
- (3) Bagi anggota ABRI yang meninggal dan keluarganya tidak dikenal atau tidak mempunyai keluarga sama sekali dan yang biaya pemakamannya ditanggung sepenuhnya oleh ABRI, tidak diperlukan persetujuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini..

Menentukan saat kematian menurut P.P 18 tahun 1981,Kriteria saat kematian yang konvensional, seorang telah meninggal dunia apabila keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti.

Khusus untuk transplantasi saat kematian ditentukan oleh dua orang dokter yang tidak ada sangkut paut medik dengan dokter yang melakukan

⁹¹ *Ibid.*, h. 203

transplantasi. Kriteria khusus saat kematian untuk transplantasi : menentukan saat meninggalnya seseorang di Rumah sakit modern dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut encephalograaf, yaitu suatu alat yang mencatat aktivitas otak.⁹²

3) Otopsi Kehakiman/Forensik

Otopsi kehakiman (*forensik*) atau, pemeriksaan mayat untuk peradilan ialah otopsi yang dilakukan atas dasar perintah yang berwajib untuk kepentingan peradilan, karena peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, cara melakukannya tidak berbeda dari otopsi klinik.

Otopsi kehakiman / forensik selain dilakukan di Rumah sakit bila perlu dikerjakan di tempat kejadian perkara atau di tempat di mana mayat dikuburkan (misal di pemakaman umum), bila mayat tidak mungkin diangkut di Rumah sakit.

Yang berwenang minta otopsi kehakiman / forensik ialah :

(1) Penyidik (KUHP 133, 134, 135)

(2) Hakim pidana (KUHP 180)

Yang dimaksud dengan penyidik (KUHP pasal 1, KUHP pasal 6) untuk kejahatan kriminal ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia dengan pangkat paling rendah pelda (aipda).

⁹² *Ibid.*, h. 204

Di daerah terpencil penyidik pembantu diberi wewenang sebagai penyidik dan pangkat paling rendah adalah serda (Bripda) (KUHP pasal. 11).

Kata pemeriksaan mayat untuk peradilan, otopsi kehakiman *Gerechtelijke lijkschoowing*, selain di KUHP 133 yang dijumpa di KUHP 222.

Pasal 222 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk peradilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Bedah mayat (otopsi) adalah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam untuk mencari kelainan, kekerasan yang terjadi di dalam tubuh jenazah kemudian dan mengaitkan dengan penyakit-penyakit atau kekerasan yang ada. Sehingga bisa diambil kesimpulan sebab pasti kematian, mekanisme kematian dan cara kematian. Prosedur ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dan bagaimana orang tersebut meninggal. Bedah mayat (otopsi) dilakukan jika kematian seseorang dianggap tidak wajar.

Otopsi forensik dilakukan terhadap mayat seseorang yang diduga meninggal akibat suatu sebab yang tidak wajar seperti kasus kecelakaan, pembunuhan maupun bunuh diri. Sedangkan otopsi klinis ialah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penelitian hasil usaha pemulihan

kesehatan. Otopsi ini dilakukan atas permintaan penyidik sehubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara. bedah mayat (otopsi) anatomis hanya diberlakukan di rumah sakit pendidikan atau fakultas kedokteran.

Untuk menentukan penyebab kematian seseorang mutlak harus dilaksanakan otopsi secara lengkap (complete autopsy) bukan otopsi sebagian (partial autopsy) untuk menyingkirkan kemungkinan penyebab kematian yang lain. Bedah mayat (otopsi) bisa dilaksanakan kapan saja. Dalam artian bedah mayat (otopsi) bisa dilaksanakan atas permintaan dari penyidik. Sebelum pelaksanaan otopsi dilangsungkan terhadap si jenazah, maka hal yang dilakukan ialah melakukan persiapan terlebih dahulu. Hal-hal yang harus dipersiapkan diantaranya

- 1) Melengkapi surat-surat yang berkaitan dengan otopsi yang akan dilakukan, termasuk surat izin keluarga, surat permintaan pemeriksaan/pembuatan visum et repertum.
- 2) Memastikan mayat yang akan diotopsi adalah mayat yang dimaksud dalam surat tersebut.
- 3) Mengumpulkan keterangan yang berhubungan dengan terjadinya kematian selengkap mungkin untuk membantu memberi petunjuk pemeriksaan dan jenis pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan.
- 4) Memastikan alat-alat yang akan dipergunakan telah tersedia, diantaranya :

- a) Alat pengukur :
 - Timbangan besar sampai 500 kg (kalau ada)
 - Timbangan kecil sampai 3 kg
 - Pita pengukur
 - Penggaris
 - Alat pengukur cairan
- b) Alat untuk otopsi :
 - Pisau, cukup pisau belati yang tajam
 - Gunting
 - Pinset
 - Gergaji dengan gigi yang halus
 - Jarus besar atau jarum goni
 - Benang yang kuat
- c) Bahan lain yang diperlukan
 - Botol/topples untuk spesium pemeriksaan toksikologi
 - Alkohol 96% untuk fiksasi pemeriksaan toksikologi (5 liter)
 - Botol untuk spesium pemeriksaan histopatologi
 - Formaline 10% sebanyak 1 liter
 - Kaca sediaan dan kaca penutup⁹³

Pelaksanaan bedah mayat (otopsi) adalah suatu proses dimana tubuh dari jenazah itu di bedah mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebelum dilaksanakannya otopsi pertama kali dokter akan melakukan pemeriksaan

⁹³ Ibid., 210

eksternal terhadap tubuh jenazah. Pemeriksaan eksternal tersebut meliputi :

1. Identifikasi meliputi pemeriksaan
 - a) Jenis kelamin
 - b) Panjang dan berat badan
 - c) Umur
 - d) Warna kulit, mata, rambut
 - e) Keadaan gigi geligi
 - f) Kelainan pada kulit (tatouage)
 - g) Penyakit (cekot, tumor dalam uterus)
 - h) Sidik jari, sidik telapak kaki
 - i) Pakaian dan benda milik pribadi
2. Kaku mayat

Sebelum pakaian mayat dilepaskan terlebih dulu dicatat kaku mayat, pemeriksaan harus dilakukan demikian karena kaku mayat yang sudah lengkap, bila kemudian dilenturkan tidak akan kembali lagi. Hal tersebut dapat menghindarkan salah paham dari orang awam misalnya : untuk melepaskan pakaian kaku mayat pundak dan leher harus dilenturkan, bila pada mayat tidak dilakukan otopsi tetapi diserahkan kembali kepada keluarga dan waktu mayat dimandikan keluarga mendapatkan leher sangat lemas, sehingga timbul penafsiran yang bukan-bukan misalnya dikira ruas tulang leher patah. Setelah pakaian dilepas semua isi saku dikeluarkan dan diperiksa, kemudian dicatat untuk kepentingan identifikasi pakaian diperiksa adanya noda darah, lumpur, robekan, bekas lubang

anak peluru dsb. Pakaian dan benda yang ditemukan dibungkus rapi diberi label dan disegel dengan dilak kemudian diserahkan kepada penyidik.⁹⁴

3. Lebam mayat

Selanjutnya, diperhatikan lebam mayat, ada kalanya ditemukan lebam mayat pada dua tempat yang letaknya berlawanan, ini berarti posisi mayat pernah dirubah.

Warna lebam mayat biasanya merah ungu (livide), pada keracunan dengan karbon monoxide pada kebakaran, keracunan gas masak (CO), asam sianida (HCN), warna menjadi merah terang (cherry red). Lebam mayat ini juga menjadi merah terang pada mayat yang disimpan di kamar dingin dengan suhu yang rendah sekali.

4. Pembusukan

5. Panjang dan berat badan Mayat kemudian diukur panjangnya dan ditimbang beratnya.

6. Kepala :

- a. Luka : ada luka atau tidak
- b. Bentuk : bulat, lonjong, bulat lonjong
- c. Rambut, kumis, janggut, alis : warna, panjang, lurus/berombak/keriting.
- d. Mata
 - Selaput biji mata (conjunctiva bulbi), selaput kelopak mata (conjunctiva palpebra); pucat, merah, kuning, bintik-bintik perdarahan.

⁹⁴ Ibid, h. 211

- Selaput bening (cornea); bening, keruh, parut luka, lensa kontak
 - Selaput pelangi (iri); warna, iri dektomi
 - Menik mata (pupil); sama lebar, diameter
 - Lensa mata; keruh, aphakia
 - Mata palsu (prothesis)
- e. Hidung:
- Bentuk : mancung, pesek
 - Cairan yang keluar; darah, buih
- f. Mulut :
- Bentuk bentuk bibir, warna bibir
 - Cairan yang keluar : darah, buih
 - Formula gigi, isian gigi (filling plompage)
 - Gigi palsu, jembatan gigi (prothesis)
 - Gigi dipangur
- g. Telinga : bentuk, cairan yang keluar, misal darah
7. Leher : luka bekas alur jerat, dan bekas cekikan
8. Dada :
- Bentuk simetris
 - Bentuk payudara
 - Luka
9. Perut :
- Bentuk cekung, membesar
 - Warna daerah usus buntu (appendix), coecum
 - Keadaan pusat, tali pusat
 - Parut luka di lipat paha (inguinalis)
 - Burut (hernia)
 - Luka.

10. Alat kelamin laki-laki :
 - Rambut kemaluan
 - Zakar (penis); bentuk khitan
 - Kandung buah pelir scrotum
 - Buah pelir (testis)
 - Perut luka⁹⁵
11. Alat kelamin wanita :
 - Rambut kemaluan
 - Bibir besar kemaluan (lablum majus)
 - Bibir kecil kemaluan (lablum minus)
 - Selaput dara (hymen)
12. Dubur (anus)
 - Bawasir (haemorrhoid)
 - Apa yang keluar
 - Parut luka
13. Anggota gerak :
 - a. Anggota gerak atas : lengan atas, lengan bawah dan tangan
 - Bengkak (oedema)
 - Luka bekas tusukan jarum
 - Luka lain
 - b. Anggota gerak bawah : tungkai atas, tungkai bawah, kaki
 - Bengkak (oedema)
 - Luka bekas tusukan jarum
 - Luka lain

⁹⁵ Ibid,h. 212

14. Punggung

- Bentuk : kekel depan (lordosis), kekel belakang (kyphosis), kekel samping (scoliosis)
- Decubitus
- Luka

15. Bokong

- Luka bekas tusukan jarum
- Luka perut⁹⁶

Semua fakta mengenai kondisi tubuh direkam dan dicatat, rekaman bisa dengan menggunakan kamera foto sebanyak dan seakurat mungkin melingkupi keseluruhan bagian detail tubuh mayat tersebut. Kemudian dilakukanlah bedah internal. Pembedahan internal ini dilakukan untuk memeriksa organ dalam tubuhnya. Misalnya, residu kandungan zat racun atau residu zat lain dalam organ dalam tubuh si mayat yang meliputi jantung, paru-paru, hati, kandung empedu, usus, limpa, lidah, otak, mata, ginjal, kandung kencing. Pembedahan juga dilakukan untuk melihat dan memastikan adanya kerusakan organ untuk memastikan penyebab kematian jika tidak ditemukan residu zat yang mencurigakan.

⁹⁶ Ibid, h. 213

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan. 1992. *Hadist Pilihan Bukhari Muslim*. Jakarta: Darul-Falah.
- Abdurrahman Al-Jaziriy. Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah. Beirut: Dar Al-Fiqry, t.t
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. Sahih Bukhori. Jilid III, Syirkah Al-Maktabah Lihab'i Wa Al-Nasr, tt
- Adurrahman Al-Jazairy. 1990. *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*. Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori. *Shahih Bukhari*. Jilid I, No. Hadits 2015. Bandung: Dahlan, tt
- Ali Bin Qasim, Al-Bajuriy, Juz, I, Mesir: Mustafa Al-Halabiy, t.t
- Al-Ustadz H. Idris Ahmad. 1969. *Fiqh Menurut Madzab Syafi'i*. Jakarta: Widjaya Djakarta.
- Amir Syarifuddin. 2009. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Azhar Basyir Ahmad. 1978. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Edisi Revisi, Yogyakarta: BPFE.
- A. Khumedi Ja'far. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Cetakan Pertama, Lampung: IAIN Raden Intan,
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 1997. *Methodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Departemen Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-quran dan Terjemahannya*, Cetakan Kedua. Bandung: PT Mizan Buaya Kreativa.

Departemen Agama RI. 1999. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Al-Wa'ah.

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.

Dikutip dalam bukunya Al Hafidh Hajar Al Asqalani.

Dikutip dalam bukunya Al Iman Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori.

Ghufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Semarang: IAIN Walisongo.

Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi. 2004. *Jual beli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

H.M Hasbi Umar. 2007. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hoediyanto-hariadi A. 2010. *Ilmu kedokteran forensik dan medikolegal*. Surabaya: alumni.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerbit Darul Akhyar, Beirut, 773 H-852H

Ibnu Humam, Fath Al-Qadir, Juz, VI, Beirut: Dar Al-Fikry, t.t

- Ibnu Qudamah. 1987. *Al-Mughni*. Juz III. Bandung: Alma'arif.
- Imam Ahmad bin Hambal. 1993. Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal juz IV. Libanan: Dar al-Kutub al-ilmiyah.
- Ismail Nawawi. 2012. *Fikih Mu'amalah* Klasik Kotemporer. Bogor: Graham Indonesia.
- Kadir Muhammad Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung.
- Kadir Muhammad Abdul. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kadir Muhammad Abdul. 1982. *Hukum Perikata*. Bandung: Alumni.
- Khoirul Abror. 2013. *Fiqh Ibadah*, Cetakan keempat. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Khoirul Abror. 2016. *Fiqh Ibadah*, Cetakan keenam. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
- Komariah. 2008. *Hukum Perdata*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Ladzi Yakunu Bil Falati Wa Yahtaju Ilaihi Yar'i Kala'i Tahrim Mani Badlaihi WA Tahrimu Bay'i Dhirobi Al-Fahli, Juz : 8
- M. Abdul Mujieb, dkk. 2002. *Kamus Istilah Fiqh*, Cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: alumni.
- Madani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana.

Maktabu Syamilah, *Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi*, Bab Tamrin Bay'i Fadhil Ma'i

Moh Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor Indonesia: Ghlia.

Muhammad Amin Suma. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Jakarta: Paragonatama Jaya.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. 2005. *Al Lu'lu' Wal Marjan*, penerjemah Salim Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu.

Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Nasrun Harun. 2007. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Nazar Bakry. 1994. *Problema Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan pemerintah (pp) nomor 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasikan alat atau jaringan tubuh manusia.

R. Subekti. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya. Paramita, Rachmat Syafei. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Racmat Syafe'i. 2015. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cetakan 5. Jakarta: Pustaka Setia.

Rahman Dahlan, Abd. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Ridwan Khairandy. 1999. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqh*, penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani. Ahmad Ikhwan, dan Budiman Musthofa. 2005. Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani.

Salim H.S. 2008. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz, III Beirut: Dar Al-Al-Fikry, t.t

Sayyid Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah*. Jilid ke 12. Bandung: Alma'arif.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Suhendi Hendi. 2013. *Fiqh Muamalah*. , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sulaiman Rasjid. 2002. *Fiqh Islam*, Cet Ke-35. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Susiadi. 2015. *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*,penerjemah

Imron Rosadi. 2013. Amiruddin dan Imam Awaliddin, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam.

Syamsudin Muhammad ar-Ramli. 2004. *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.

Yusuf Qardhawi. 2003. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Alih bahasa oleh H. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT Bina Ilmu.

https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-undangan_Indonesia Di akses pada tanggal 28 february 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jenazah>